

## DINAMIKA PERJUANGAN SUKU KURDI IRAQ DALAM MEMPEROLEH STATUS WILAYAHNYA DI IRAQ

Eriksa Gutama<sup>1\*</sup>, Surwandono<sup>2</sup>, Ali Maksum<sup>3</sup>,

<sup>1, 2&3</sup>Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Korespondensi: eriksa.gutama@gmail.com

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain the dynamics of the Iraqi Kurdish struggle before and after the Saddam Hussein era. In this study, the authors explain how the dynamics of the Iraqi Kurdish struggle in obtaining regional autonomy as well as Saddam Hussein's political attitudes and leadership style. Iraq's still-fruitless Kurdish struggle with the crisis Baghdad is experiencing in the frame of a long conflict entering a phase of mutually hurting stalemate has led the two to choose the path of peace negotiations. Although Baghdad's peace treaty deal deal with the Kurds was hampered on the Kirkuk issue, with the phenomenon of the withdrawal of Iraqi troops from the UN protected zone and its migration of Saddam Hussein loyalists from the Territory of Northern Iraq made the opportunity for the Kurds to take over the region so that in 1992 under the shadow of the UN and allies, the KDP and PUK held free elections and established a Kurdistan Regional Government (KRG) for the Arbil region, Dohuk, and Sulaymanya. The KRG also turned the unarmed Peshmerga fighters into a regional defense force that would maintain peace and stability in the region. At this time the Kurds were able to create a safe and stable environment conducive to private and public investment.*

**Keywords:** *Iraqi Kurds; Conflict; Iraq Crisis; Federation; Autonomy*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dinamika perjuangan Kurdi Iraq sebelum dan sesudah era Saddam Hussein. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana dinamika perjuangan Kurdi Iraq dalam memperoleh otonomi wilayahnya serta sikap politik dan gaya kepemimpinan Saddam Hussein. Perjuangan suku Kurdi Iraq yang masih belum membawa hasil dengan krisis yang dialami Baghdad dalam bingkai konflik panjang yang memasuki fase *mutually hurting stalemate* telah menggiring keduanya untuk memilih jalan negosiasi damai. Meskipun kesepakatan perjanjian perdamaian Baghdad dengan Kurdi terhambat pada masalah Kirkuk, dengan fenomena penarikan pasukan Iraq dari zona wilayah perlindungan PBB dan migrasinya para loyalis Saddam Hussein dari wilayah Iraq Utara menjadikan kesempatan bagi Kurdi untuk mengambil alih wilayah tersebut sehingga pada tahun 1992 dibawah bayang-bayang PBB dan sekutu, KDP dan PUK mengadakan pemilihan bebas dan mendirikan Kurdistan Regional Government (KRG) untuk wilayah Arbil, Dohuk, dan Sulaymanya. KRG juga mengubah pejuang Peshmerga yang tidak bersenjata lengkap menjadi kekuatan pertahanan regional yang akan menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pada saat ini Kurdi mampu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil yang kondusif bagi investasi swasta dan publik.

**Kata kunci:** Kurdi Irak; Konflik; Krisis Irak; Federasi; Otonomi.

## PENDAHULUAN

Bangsa Kurdi merupakan bangsa besar yang tidak memiliki wilayah teritorial. Dahulu bangsa Kurdi berkedudukan semi otonom di bawah kekuasaan berbagai kerajaan, termasuk dari abad ke-16 kerajaan Persia dan Kerajaan Ottoman telah memberikan hak otonom bagi bangsa Kurdi dalam rangka memelihara perdamaian di perbatasan terbuka mereka (Yildiz, 2017).

Peluang kurdi untuk mendirikan negara sendiri muncul di masa keruntuhan kerajaan Ottoman pada akhir perang dunia pertama. Ketika itu Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson memberikan pernyataan bahwa minoritas non-Turki dari kerajaan Ottoman dijamin secara mutlak tanpa ada gangguan peluang untuk mengembangkan otonominya (Yildiz, 2017).

Disusul pada tahun 1920 telah ditandatangani perjanjian Sevres "*Treaty of Sevres*" (McDOWALL, 2005) antara negara-negara sekutu (Amerika Serikat, Inggris dan Prancis) dengan Pemerintah Kerajaan Ottoman yang mempertimbangkan sebuah negara Kurdi yang independen. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak terealisasi karena adanya tantangan dari pihak negara republik Turki baru di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak diakui dan

berdampak perang. Kemudian terjadilah kesepakatan baru yang ditengahi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Inggris dalam Perjanjian Lausanne "*Treaty of Lausanne*" 1923 (Mahmod, 2016). Dalam perjanjian tersebut posisi Kurdi dengan segala kepentingannya tidak menjadi *concern* di dalamnya, sehingga pada wilayah yang tunduk pada perjanjian Sevres dikembalikan kepada kedaulatan Turki dan sisanya dibagi antara Iran dan negara baru Irak (Yildiz, 2017).

Meskipun orang-orang Kurdi hidup di wilayah republik Armenia dan Azerbaijan, di Syiria dan juga Khurasan Iran bagian selatan, atau kota-kota di Istanbul, Ankara, Tabriz dan Tehran, namun mayoritas orang-orang Kurdi masih menempati wilayah pegunungan dan dataran tinggi Zagros yang terbagi dalam wilayah perbatasan Turki, Irak, dan Iran. Jumlah populasinya sekitar 23% dari populasi Turki, 23% dari Irak, dan 10% dari Iran (McDOWALL, 2005).

Suku Kurdi yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Turki merasa disudutkan dengan kebijakan pembatasan-pembatasan pemerintah yang telah mengaburkan keberadaan suku Kurdi di Turki bahkan mereka disebut pemerintah sebagai "orang Turki Pegunungan". Atas

dasar itulah salah satu tokoh cendekiawan Kurdi bernama Abdullah Ocalan pada tahun 1978 berinisiatif mendirikan *Partiya Karkerên Kurdistanê* (PKK) yang mengajak orang-orang Kurdi lainnya untuk menuntut supaya mendirikan sebuah negara Kurdi di Turki. Gerakan partai PKK diliputi dengan konflik kekerasan dengan pemerintah Turki hingga menewaskan 40.000 dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal (BBC News, 2019).

Kemudian di tahun 1990 PKK merubah tuntutannya pada otonomi politik dan budaya. Terjadi gencatan senjata di tahun 2013, namun gagal di tahun 2015 setelah terjadinya insiden bom bunuh diri yang telah menewaskan 33 aktivis Kurdi di Suruc yang berbatasan dengan Syiria. Pada saat itu pemerintah Turki menganggap organisasi *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) merupakan aktor yang harus bertanggung jawab terhadap insiden tersebut, namun partai PKK menganggap ada pembiaran dari pemerintah Turki, sehingga menimbulkan peperangan antara pemerintah Turki dan partai PKK yang dinamai oleh pemerintah Turki sebagai “perang terpadu melawan terror” karena lawan yang diperangi pemerintah Turki adalah PKK dan ISIS (BBC News, 2019). Hingga saat ini PKK dianggap pemerintah Turki sebagai kelompok teroris.

Tidak berbeda jauh dengan keadaan Kurdi di Turki, Kurdi di Iran pun menghadapi masalah yang sama meskipun Kurdi Iran sempat mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara republik Mahabbad dengan perlindungan dari Uni Soviet pada 22 Januari 1946 namun hanya berumur pendek setelah direbut kembali oleh pemerintah Shah Iran. Harapan Kurdi Iran akan terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan otonom setelah andilnya bersama oposisi dalam revolusi menggulingkan Shah Iran tahun 1979 berujung pada keterasingan politik yang disebabkan sikap kontradiktif dari pemerintahan yang baru (Nasrullah, 2020).

Lain halnya dengan suku Kurdi di Syiria, 7-10% dari populasi penduduk Syiria merupakan dari suku Kurdi. Bertempat tinggal di Damaskus, Aleppo, Kobane, Afrin, dan Qamishli, Kurdi Syiria tidak diberi hak-hak sipil dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Syiria sejak tahun 1960-an. Kebijakan Arabisasi atau Dekurdisasi pemerintah Syiria telah menyalakan api pemberontakan, hingga saat ini Kurdi Syiria tergabung dalam koalisi AS dan oposisi dalam upaya menggulingkan rezim Assad (BBC News, 2019).

Suku Kurdi yang berada di Irak merupakan satu-satunya yang telah memperoleh hak otonomi pada tahun 2005 meskipun diwarnai dengan konflik panjang dengan Baghdad pada masa rezim Saddam Hussein yang dikenal otoriter. Penduduk Kurdi Irak menempati wilayah Dohuk, Arbil, Sulemaniah, dan Kirkuk yang masih menjadi permasalahan Kurdi dan Baghdad menimbang sumber cadangan minyak bumi yang besar di wilayah tersebut (Gunter, 2011).

Kurdi Iraq menyuarakan tuntutan dan aspirasinya lewat partai *Kurdish Democratic Party* (KDP) yang dipimpin Mustofa Barzani dan *Party Union of Kurdish* (PUK) yang dipimpin Jalal Talabani. Kemudian setelah itu dibentuklah *Kurdish Regional Government* (KRG) sebagai wadah pengambilan kebijakan antara partai KDP dan PUK di wilayah otonomi Kurdi. KRG dilengkapi dengan pasukan militer yang cukup kuat bernama Peshmerga yang mengamankan dan memperjuangkan kepentingan Kurdi di Iraq hingga saat lengsernya pemerintahan Saddam Husein, terpilihlah Jalal Talabani menjadi presiden Iraq yang resmi dan Masoud Barzani sebagai presiden regional otonom wilayah Kurdi Iraq (KRG).

Dari latar belakang di atas ada yang menarik untuk kita soroti bahwa di tengah sulitnya suku Kurdi di Turki, Iran, dan Syiria dalam memperoleh pengakuan dan otonomi di negara mereka masing-masing. Suku Kurdi di Iraq meskipun diawali dengan perjuangan panjang melawan pemerintahan pusat Iraq (Baghdad) yang sangat kuat dan otoriter dibawah kepemimpinan Saddam Hussein berhasil memperoleh hak otonominya dan dapat menunjukkan perannya di pemerintahan Iraq sebagai Presiden menggantikan Saddam Hussein.

#### METODE

Penulis menggunakan teknik metode *Kualitatif* dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data dari buku, jurnal, dan berita. Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, yang menunjukkan: a) Pemerintah Iraq dengan kebijakannya terhadap suku Kurdi di Iraq bagian Utara; b) Jangkauan Penelitian dari kebijakan pemerintah Iraq sebelum era Saddam Hussein hingga lengsernya; c) Sumber data terdiri dari buku, artikel jurnal, serta data-data internet yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam upaya menyempurnakan penelitian ini penulis melakukan pengkajian data dari beberapa sumber baik

buku, jurnal, maupun artikel lainnya yang membahas Kurdi dan gerakan separatisme, kemudian menyeleksi dan mengutip kedalam Penelitian. Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam membaca permasalahan Kurdi Iraq yang digambarkan dengan fakta yang ada. Kemudian menarik sebuah kesimpulan setelah menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya. Maksud dari penelitian kualitatif ini supaya dapat memahami lebih dalam tentang manusia karena pemerintahan itu digerakkan oleh manusia. Dengan dasar “bagaimana” sebagai awal penelitian dan tidak hanya berpatokan pada “apa, dimana, dan kapan” menjadi fokus terhadap studi kasus ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sikap Politik dan Gaya Kepemimpinan Saddam Hussein

Sebagaimana yang telah dibahas di bagian sebelumnya, perjuangan suku Kurdi Iraq dalam memperoleh status otonomi wilayahnya masih belum membuahkan hasil karena selalu berbenturan dengan Baghdad dari berbagai masa kepemimpinan yang diwarnai dengan kudeta dari militer (Blaydes, 2018). Tahun 1979 merupakan masa sulit bagi Kurdi dimana Baghdad mulai dipimpin Saddam Hussein yang lebih jeli melihat hubungan partainya dengan militer Baghdad (Malcolm, 1993).

Saddam Hussein di masa kepemimpinannya memastikan internal partainya Bath dan hubungan antara partai Bath dengan militer Baghdad baik sehingga kemungkinan terjadinya kudeta seperti yang telah terjadi pada pemimpin-pemimpin sebelumnya minim. Gaya kepemimpinan Saddam Hussein digambarkan memiliki tiga pilar utama, yakni: Partai, Militer, dan Birokrasi yang ketat. Peranan partai Bath di masa rezim Hussein sangat mendominasi semua aspek. Adanya kebijakan *reward and punishment* yang diterapkan era Saddam Hussein di lini masyarakat maupun militer telah menumbuhkan dan memperkuat *loyalis-loyalisnya* dari kalangan militer dan sipil dengan berbagai *reward* sehingga benih-benih pemberontakan dari kalangan sipil dan militer dapat diketahui dengan cepat dan dapat diatasi (Blaydes, 2018).

Semakin solidnya pemerintahan Saddam Hussein dengan banyak loyalis-loyalisnya dari sipil dan militer telah membuat ruang gerak suku Kurdi di Iraq semakin sempit. Gaya kepemimpinan Saddam Hussein apabila kita lihat di Indonesia seperti halnya gaya kepemimpinan Presiden Soeharto dengan peran partai Golkar yang mendominasi hingga aspek birokrasi. Setelah memfungsikan peranan partai Bath di

segala lini yang Faust sebut dengan “*Ba’thification*” Saddam Hussein Kembali mengeluarkan kebijakan “*Pan-Arabisme*” yang juga dijalankan Presiden Assad di Syiria.

Ketegangan Iraq dan Iran yang muncul setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1979 telah mempengaruhi cara pandang Saddam Hussein terhadap suku Kurdi yang memiliki kedekatan dengan Iran. “*Pan-Arabisme*” yang digaungkan Saddam Hussein menggiring pada “Arabisasi” di wilayah Iraq Utara yang didiami oleh penduduk suku Kurdi yakni wilayah Kirkuk dan sekitarnya sehingga banyak suku Kurdi yang terusir dari rumahnya.

Pada April 1980 terjadi ledakan bom di wilayah Iraq yang pada saat itu Iran dianggap aktor yang harus bertanggung jawab hingga akhirnya terjadi pecah Perang Teluk Iraq dan Iran tahun 1980-1988 (McDOWALL, 2005). Perang Teluk yang terjadi antara Iraq dan Iran tidak lepas dari sentiment antara Sunni dan Syiah yang menjadi landasan Saddam Hussein akan kekhawatiran terjadinya ekspansi yang disponsori Syiah Imam Khomeini apalagi melihat dukungan negara-negara dan pemimpin-pemimpin Syiah seperti Syiria, Hizbullah, Hamas, dan gerakan-gerakan

perlawanan yang terjadi di negara-negara lainnya (Humaini, 2019).

Pada tahun 1983 pasca perang teluk pertama Iraq dan Iran, Kurdi Iraq kembali melakukan pemberontakan dalam rangka perlindungan diri atas terdesaknya etnis Kurdi akibat program Arabisasi Saddam Hussein di wilayah utara (Dulz, 2016). Namun berimbas pada lahirnya kebijakan “Operasi Anfal” tahun 1988 yang Sherko Kirmanj dan Aram Rafaat tafsirkan menjadi dua tujuan yakni: “*the security-anfal*” atau untuk melindungi dari tindakan kelompok pemberontakan Kurdi dan “*the identity-anfal*” atau motif “dekurdifikasi” wilayah provinsi Kirkuk yang merupakan wilayah strategis baik segi ekonomi maupun politik (Kirmanj & Rafaat, 2020)

Operasi ANFAL di tahun 1988 merupakan tanda kekejaman Saddam Hussein ketika itu, Baghdad dua kali menghujani bom-bom kimia di beberapa kota yang berpenduduk Kurdi diwilayah utara Iraq salah satu kota yang terkenal Halabja yang menewaskan sekitar 5000 warga Kurdi di dalamnya dan sebagian besar lainnya mengungsi ke sepanjang perbatasan Iran dan Turki (Romano, 2006).

Belum usai Iraq dari perang teluk dengan Iran, kembali pada tanggal 2 Agustus 1990 Iraq melakukan invasi pada wilayah Kuwait yang mengundang reaksi dari Amerika Serikat dan sekutu sehingga akibat dari invasi Iraq tersebut Iraq mendapatkan kebijakan embargo sehingga memukul perekonomian Iraq. Kependudukan Iraq di Kuwait akhirnya berakhir setelah pada tahun 1991 Amerika dan sekutu berhasil memukul mundur Iraq dari Kuwait (Gray, 2010).

Genosida dengan senjata kimia yang dilakukan Baghdad terhadap suku Kurdi telah menimbulkan kecaman dan sanksi ekonomi dari dunia internasional. Serangan udara Baghdad yang membabi buta kepada penduduk Kurdi memunculkan reaksi Dewan Keamanan PBB sehingga pada 5 April 1991 mengeluarkan Resolusi PBB No. 688 yakni pemberlakuan kawasan larangan terbang atau “*No Fly Zone*” di atas wilayah Iraq bagian utara guna melindungi suku Kurdi dari jatuhnya bom-bom yang dibawa pesawat tempur Baghdad (McDOWALL, 2005).

Dilanjutkan dengan pembangunan kawasan tempat berlindung (*save heaven*) di sepanjang perbatasan Iraq-Turki oleh sekutu Barat dan Turki untuk menarik pengungsi Kurdi yang terdampar ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan Amerika Serikat membangun enam tempat penampungan

untuk membantu para pengungsi Kurdi yang masih berada di daerah-daerah pegunungan maupun yang tinggal di tenda-tenda pengungsian di Iran dan Turki agar kembali ke Iraq dengan penjagaan barat dari serangan Baghdad (McDowall, 2005).

Pemerintah Iraq akhirnya tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi pembangunan tempat penampungan dengan keberadaan pasukan Amerika Serikat beserta sekutu di wilayah Iraq bagian utara dan mengalihkan perhatiannya untuk fokus agar sanksi ekonomi terhadap Iraq segera dicabut.

Keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 688 nya bertujuan untuk mendamaikan antar pihak Baghdad dan suku Kurdi sehingga konflik berdarah yang telah lama berlangsung dapat teratasi. Merujuk pada fungsi PBB yang didirikan pasca Perang Dunia ke-2 adalah untuk mencegah terjadinya kembali bangsa-bangsa yang menjadi korban keganasan tirani atau kepemimpinan yang otoriter dan memposisikan hubungan-hubungan internasional diatas dasar hukum bukan kekuasaan (Adwani, 2018).

## Dinamika Negosiasi Kurdi – Baghdad era Saddam Hussein

Perjuangan suku Kurdi Iraq yang masih belum membawa hasil dengan krisis yang dialami Baghdad dalam bingkai konflik panjang yang memasuki *fase mutually hurting stalemate* telah menggiring keduanya untuk memilih jalan negosiasi damai.

Dalam upaya menyelesaikan konflik, suku Kurdi dan Baghdad sepakat untuk melakukan perundingan damai dan Saddam Hussein saat itu telah memberikan janji hak otonomi yang lebih luas bagi wilayah Kurdi Iraq. Keraguan Kurdi muncul setelah berkaca pada pengalaman di tahun 1970 dan 1974 yang tidak sepenuhnya dipenuhi (McDOWALL, 2005). Ditambah lagi adanya anggapan bahwa tawaran otonomi Saddam Hussein tersebut hanyalah upaya untuk menggalang perhatian negara-negara barat sehingga sanksi ekonomi terhadap Iraq dicabut dan membuat keadaan dalam negeri Iraq membaik Saddam Hussein Pun bisa tetap bertahan sebagai Presiden Iraq. Dalam hal ini suku Kurdi sangat jeli dalam setiap pengambilan kebijakan dan kesepakatan dengan Baghdad dan harus diikuti dengan jaminan internasional.

Perundingan tahap pertama pada 24 April 1991 antara Baghdad dengan utusan Kurdi yang dipimpin Jalal Talabani yang

membahas tentang masalah otonomi Kurdi Iraq serta jaminan internasionalnya. Keduanya menyepakati perealisasiian pakta otonomi 11 Maret 1970 yang menyatakan provinsi Dahuk, Arbil dan Sulaymaniah sebagai wilayah otonom Kurdi sedang wilayah Kirkuk masih tertahan kesepakatannya.

Dalam perundingan tersebut Kurdi menawarkan sistem pemerintahan koalisi di wilayah Kirkuk yang mana Kurdi membangun pemerintahan otonomi di wilayah tersebut dan pengelolaan minyak di wilayah tersebut ditangani pihak Baghdad dengan persentase anggaran negara kepada Kurdi sesuai jumlah penduduk Kurdi di Iraq. Dari perundingan tersebut belum ada kesepakatan karena Baghdad menolak tawaran Kurdi. Alasan penolakan Baghdad dipandang delegasi Kurdi tidak realistis untuk diterima karena Kirkuk dianggap bukan kota Kurdi (Blaydes, 2018).

Pada saat belum adanya kesepakatan yang tercapai antara Kurdi dan Baghdad, sebanyak 9000 orang Kurdi yang mengungsi di wilayah perbatasan Turki, Iran dan wilayah pegunungan kembali ke rumah mereka masing-masing dan *camp-camp* yang dilindungi pasukan Amerika dan sekutunya di Iraq Utara.

Perundingan tahap kedua yang dimulai tanggal 6 Mei 1991 antara Baghdad dengan perwakilan Kurdi dari partai KDP Massoud Barzani pengganti mendiang ayahnya Mullah Mustafa membahas tentang rincian otonomi yang dijanjikan. Dalam perundingan tersebut Kurdi dan Baghdad membahas persatuan nasional, sistem demokrasi yang akan diterapkan di Iraq, normalisasi di wilayah Kurdi Iraq pasca perang dan pemulangan kembali penduduk Kurdi yang mengungsi di perbatasan.

Dalam perundingan tersebut juga Kurdi meminta jaminan internasional atas setiap perjanjian otonomi antara Kurdi dengan Baghdad dan Kurdi masih meminta Kirkuk dimasukkan dalam wilayah otonominya. Meskipun pembahasan akan penerapan sistem demokrasi di negara Iraq telah sampai pada persetujuan, namun penentuan Kirkuk sebagai wilayah otonom Kurdi masih menjadi pokok perdebatan sehingga penandatanganan perjanjian damai pun mengalami penundaan. Pada akhirnya Baghdad tidak sependapat dengan Kurdi berkenaan dengan masalah Kirkuk dengan dalih suku penduduk Kirkuk pada saat itu heterogen dan bagi Baghdad kesepakatan dengan Kurdi merupakan urusan rumah tangga negara sehingga tidak perlu jaminan internasional (McDOWALL, 2005).

Perundingan Baghdad dan Kurdi berlanjut pada 17 Juni 1991, Massoud Barzani menawarkan kembali pada Baghdad pemerintahan yang terbagi di wilayah Kirkuk, sehingga dibagi menjadi dua provinsi yaitu setengah wilayah dikelola otonomi Kurdi, setengah lainnya dikelola Baghdad dan Kurdi dalam satu pemerintahan. Namun kedua belah pihak belum juga mencapai kesepakatan (McDOWALL, 2005).

Pada 24 Juni 1991 Baghdad menyatakan akan memberikan hak otonomi wilayah Kirkuk pada Kurdi dengan menyertakan beberapa syarat yang harus Kurdi penuhi. *Pertama*, dukungan pada Revolusi 1968 yang membuat Partai Baath berkuasa. *Kedua*, hubungan kerja sama Kurdi dengan asing harus atas izin Baghdad. *Ketiga*, mau bekerja sama dengan Partai Baath melawan musuh partai juga menentang negara Iran. Dengan persyaratan Baghdad yang dianggap memberatkan Kurdi pun menolak sehingga kesepakatan yang berkaitan dengan wilayah Kirkuk menghambat persetujuan damai keduanya.

Sebulan kemudian terjadi demonstrasi yang dilakukan Kurdi yang berujung pertempuran antara Kurdi dengan militer Baghdad di Arbil dan Sulaymaniah

dengan korban jiwa antara 140-150 orang. Pertempuran tersebut terjadi akibat belum adanya kesepakatan perjanjian damai Baghdad dengan Kurdi tentang dimasukkan atau tidaknya Kirkuk dalam wilayah otonom Kurdi.

Meskipun kesepakatan perjanjian perdamaian Baghdad dengan Kurdi terhambat pada masalah Kirkuk, dengan fenomena penarikan pasukan Iraq dari zona wilayah perlindungan PBB dan migrasinya para loyalis Saddam Hussein dari wilayah Iraq Utara menjadikan kesempatan bagi Kurdi untuk mengambil alih wilayah tersebut sehingga pada tahun 1992 dibawah bayang-bayang PBB dan sekutu, KDP dan PUK mengadakan pemilihan bebas dan mendirikan *Kurdistan Regional Government* (KRG) untuk wilayah Arbil, Dohuk, dan Sulaymanya. KRG juga mengubah pejuang Peshmerga yang tidak bersenjata lengkap menjadi kekuatan pertahanan regional yang akan menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pada saat itu Kurdi mampu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil yang kondusif bagi investasi swasta dan publik.

### **Transformasi Tata Kelola Politik Suku Kurdi di Iraq Pasca Invasi Amerika Serikat**

Dalam upaya invasi Amerika Serikat ke Iraq, Washington mengalokasikan sekitar \$ 90 juta untuk memobilisasi kelompok oposisi Iraq di wilayah Diaspora dan Kurdistan Iraq melawan pemerintahan Saddam Hussein. Kurdi awalnya tidak antusias menerima berita tentang perang yang dipimpin AS, karena khawatir Amerika Serikat mungkin akan menggantikan Saddam Hussein dengan pemimpin dari partai Ba'ath yang juga memiliki histori yang buruk bagi Kurdi. Sebelum membuat komitmen tegas kepada oposisi dan AS, Kurdi mencoba menguji coba untuk melihat apakah Saddam Hussein bersedia menawarkan persyaratan otonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kurdi beranggapan ketika Saddam Hussein berada di bawah sanksi ekonomi PBB dan ancaman perang AS ada kemungkinan lebih responsif terhadap tuntutan Kurdi daripada nasionalis Arab lainnya yang akan menggantikannya.

Kurdi mulai menghubungi Saddam Hussein tidak hanya untuk menguji niatnya terhadap mereka tetapi juga untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap Amerika Serikat dan kelompok diaspora dan oposisi Iraq. Kurdi menjelaskan kepada pihak oposisi bahwa mereka akan bergabung dengan mereka

asalkan mereka setuju untuk membangun sistem pemerintahan federal yang demokratis, mengakui otoritas KRG, menyelesaikan masalah wilayah Arab Kurdi, membagikan pendapatan minyak secara adil, menyetarakan identitas Kurdi dengan Arab, membagi posisi kunci di pemerintahan dengan Kurdi, dan mendesain ulang bendera nasional Iraq yang mencerminkan karakter multietnisnya. Selama pertemuan di Salahaddin, provinsi Arbil, kelompok oposisi Iraq menyetujui hak Kurdi untuk menentukan masa depan mereka tanpa pemisahan diri dari negara kesatuan Iraq.

### SIMPULAN

Gerakan separatisme suatu wilayah itu akan muncul apabila adanya kesenjangan sosial, krisis etnis, dan sengketa sumber daya alam. Motivasi gerakan separatis bisa berwujud mendirikan negara baru yang berdaulat, ataupun berakhir pada pemberian hak otonomi pada wilayah tersebut sehingga bisa mengatur urusan regional sendiri dan masih terhubung dengan negara induk (pemberi hak otonom). Kurdi Irak merupakan salah satu contoh fenomena gerakan separatis yang menghasilkan hak otonomi untuk di wilayah Irak Utara.

Melihat fenomena perjuangan suku Kurdi Iraq yang masih belum membawa hasil dengan krisis yang dialami Baghdad dalam

bingkai konflik panjang telah yang memasuki *fase mutually hurting stalemate* yang menggiring keduanya untuk memilih jalan negosiasi damai.

Krisis Iraq akibat invasi Amerika Serikat telah memberikan Kurdi Iraq peluang untuk meningkatkan keuntungan politik, ekonomi, dan keamanan mereka melalui pemerintahan KRG sehingga membuktikan Kurdi mampu mengelola dan mengembangkan wilayah mereka sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, T. Z. S. B. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Vetyo Amerika Serikat sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2(3), 677–688.
- BBC News. (2019, October 16). Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, siapa sesungguhnya bangsa Kurdi? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50068256#:~:text=Bangsa Kurdi merupakan salah satu,mereka tak punya dialek standar>
- BBCNews. (2003). Profile: Kurdistan Democratic Party (KDP). Retrieved from [http://news.bbc.co.uk/2/hi/not\\_in\\_website/syndication/monitoring/media\\_reports/2588073.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/not_in_website/syndication/monitoring/media_reports/2588073.stm)
- Blaydes, L. (2018). *State of repression\_ Iraq under Saddam Hussain*. Princeton University Press.

- Dulz, I. (2016). The displacement of the Yezidis and the rise of ISIS in Nother Iraq. *Kurdish Studies*, 4(2), 131–147.
- Gray, M. (2010). Revisiting Saddam Hussein's Political Language: The Sources and Roles of Conspiracy Theories, 32(1), 28–46.
- Gunter, M. M. (2011). The Kurds ascending: The evolving solution to the Kurdish problem in Iraq and Turkey. *The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey*, 1–178. <https://doi.org/10.1057/9780230338944>
- Kirmanj, S., & Rafaat, A. (2020). The Kurdish genocide in Iraq: the Security-Anfal. California.
- Mahmod, J. (2016). *Kurdish Diaspora*. new York.
- Malcolm, D. (1993). The Postage Stamp : A Window on Saddam Hussein ' s Iraq, 47(1), 77–89.
- McDOWALL, D. (2005). A Modern History Of The Kurds.
- Nasrullah, F. (2020). Etnik kurdi iran dan revolusi islam 1979 m, 8311, 1–9. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.6949>
- Romano, D. (2006). *The Kurdish Nationalist Movement*. Cambridge University Press (Vol. 53). Cambridge University Press, New York. Retrieved from [www.cambridge.org/9780521850414](http://www.cambridge.org/9780521850414)
- Yildiz, K. (2017). The Kurds in Iraq. *The Kurds in Iraq*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs45h>

#### PROFIL SINGKAT

Eriksa Gutama, S.IP., M.Hub., Int, adalah lulusan Magister Ilmu Hubungan Internasional (MIHI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya juga menempuh pendidikan Sarjana di Departemen Hubungan Internasional UMY.